

# Membayangkan Polri 2045: Profesional, Digital, dan Dekat dengan Rakyat

Oleh: Tim CSP---Center for Strategic Policing

## Pendahuluan

Menuju 2045—momentum seratus tahun kemerdekaan—Indonesia menatap era baru dengan ambisi besar: menjadi bangsa yang makmur, adil, dan berdaya saing. Di tengah lompatan demografi, urbanisasi, dan transformasi digital yang cepat, peran aparat penegak hukum menjadi semakin kritikal. Polri yang hendak relevan di era *Indonesia Emas* bukan lagi sekadar penegak aturan; ia harus menjadi institusi yang dapat dipercaya, profesional, dan adaptif terhadap perubahan sosial-teknologis.

Perkembangan sosial masyarakat saat ini memperlihatkan gejala yang khas dari **era digital**. Generasi muda tumbuh dalam ekosistem yang serba cepat, transparan, dan partisipatif. Aspirasi masyarakat tak lagi hanya disuarakan lewat ruang-ruang formal, tetapi melalui jagat media sosial yang mampu mengguncang opini publik dalam hitungan menit. Pola interaksi sosial berubah: masyarakat makin kritis, menuntut

integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang tidak berbelit.

Namun, transformasi ini membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, teknologi digital membuka peluang besar bagi Polri untuk menghadirkan layanan modern — mulai dari sistem pelaporan berbasis aplikasi, analitik data kriminal, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan dalam patroli siber. Di sisi lain, **ancaman kejahatan juga ikut berevolusi**: dari *cybercrime*, penipuan digital, dan peretasan infrastruktur vital, hingga penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang mengganggu kohesi sosial. Semua itu tak lagi mengenal batas geografis dan menuntut kapasitas Polri yang benar-benar tangguh secara teknologi.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa Polri masih menghadapi tantangan berat: **tuntutan publik akan transparansi**, kekhawatiran terhadap **penyalahgunaan wewenang**, serta kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dengan kinerja yang ditampilkan. Jika tidak segera diantisipasi, jurang kepercayaan bisa melebar dan menghambat peran Polri sebagai pilar keamanan nasional.

Dari sinilah visi Polri 2045 perlu dirancang — bukan sebagai wacana utopis, tetapi sebagai peta jalan praktis menuju institusi yang profesional dalam integritas, cakap secara digital, dan dekat dalam hubungan dengan masyarakat. Artikel ini membuka imajinasi pragmatis itu: merumuskan elemen-elemen kunci, peluang implementasi, serta hambatan yang mesti diatasi agar Polri dapat menjadi institusi kepolisian

modern yang dipercaya dan mampu menopang cita-cita Indonesia Emas.

## **Polri Profesional: Aparat Berintegritas dan Humanis**

Membayangkan Polri di tahun 2045 berarti membayangkan institusi yang benar-benar profesional dalam arti yang utuh. Profesionalisme tidak cukup diukur dari kerapian seragam atau kemampuan teknis dalam menegakkan hukum. Lebih dari itu, profesionalisme lahir dari integritas yang tinggi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta komitmen menjadikan pelayanan publik sebagai inti dari setiap tindakan. Polisi masa depan harus mampu menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan humanis yang menghormati martabat setiap warga negara.

Dalam literatur kepolisian modern, profesionalisme dipahami sebagai perpaduan antara kompetensi teknis, integritas moral, dan orientasi pelayanan publik. Model ini sejalan dengan konsep *policing by consent* yang sudah lama dikenal di Inggris, yakni gagasan bahwa legitimasi polisi bukan berasal dari kekuasaan semata, melainkan dari kepercayaan masyarakat yang secara sadar menerima kehadiran polisi sebagai pelindung. Maka, Polri yang ingin bertahan hingga 2045 harus mengakar pada kepercayaan publik, bukan sekadar pada otoritas formal.

Reformasi menuju profesionalisme dimulai dari pintu rekrutmen. Polri perlu menata ulang sistem seleksi agar lebih terbuka dan berbasis merit, mengurangi ruang bagi nepotisme maupun intervensi politik. Prinsip *good governance* menegaskan bahwa birokrasi yang bersih lahir dari mekanisme yang transparan sejak awal. Pendidikan kepolisian pun perlu diarahkan pada paradigma baru. Jika dulu orientasi lebih menekankan pada *law enforcement*, maka di masa depan pendidikan harus menyeimbangkan keterampilan teknis dengan nilai etika, akuntabilitas, serta empati sosial. Teori *community policing* memberi penekanan bahwa keberhasilan polisi ditentukan oleh kemampuannya menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat.

Namun, profesionalisme tidak dapat bertahan tanpa dukungan sistem yang adil. Polisi yang dituntut berintegritas juga harus dijamin kesejahteraannya. Menurut teori motivasi Maslow, kebutuhan dasar yang terpenuhi—mulai dari gaji layak hingga fasilitas sosial bagi keluarga—akan membuat individu lebih mampu fokus pada tanggung jawab yang lebih tinggi. Dalam konteks kepolisian, kesejahteraan yang adil akan mengurangi godaan praktik korupsi. Tetapi kesejahteraan saja tidak cukup. Teori *principal-agent* mengingatkan bahwa setiap aparat berpotensi menyalahgunakan kewenangan bila pengawasan lemah. Oleh karena itu, sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, harus diperkuat agar integritas tidak hanya bergantung pada moral

individu, melainkan juga dijaga oleh mekanisme institusional.

Profesionalisme yang diharapkan dari Polri 2045 tidak akan lengkap tanpa wajah humanis. Konsep *human rights-based policing* menegaskan bahwa setiap tindakan polisi harus berorientasi pada penghormatan martabat manusia. Polisi yang humanis tidak tampil arogan atau represif, melainkan hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam perspektif Pierre Bourdieu, legitimasi polisi tidak hanya bersumber dari kekuasaan hukum, melainkan juga dari modal sosial yang dibangun melalui kepercayaan publik. Semakin humanis polisi dalam interaksinya, semakin besar pula akumulasi modal sosial yang akan memperkuat posisinya di mata masyarakat.

Dengan demikian, Polri 2045 yang diidealkan adalah institusi yang memadukan profesionalisme dan humanisme dalam satu wajah. Kompetensi, integritas, dan akuntabilitas berjalan seiring dengan empati, pelayanan, dan penghormatan terhadap HAM. Inilah pilar yang akan membuat Polri relevan dalam masyarakat demokratis dan digital di masa depan, sekaligus menjadi fondasi kepercayaan publik yang kokoh.

## **Polri Digital: Teknologi sebagai Core System**

Masyarakat Indonesia tahun 2045 akan menjadi masyarakat digital, di mana hampir seluruh aspek kehidupan—sosial, ekonomi, hingga politik—saling

terhubung dan dipengaruhi oleh teknologi. Dalam lanskap seperti itu, Polri tidak mungkin lagi mengandalkan cara-cara konvensional dalam menjaga keamanan. Transformasi digital harus menjadi inti, core system, dari strategi kepolisian modern. Tanpa langkah ini, Polri berisiko tertinggal oleh dinamika masyarakat yang semakin cepat dan kompleks.

Dalam praktik kepolisian kontemporer, muncul konsep *big data policing*, yakni penggunaan data dalam skala besar untuk memahami pola kejahatan secara real-time. Bayangkan Polri 2045 yang memiliki sistem terpadu, menghubungkan data dari CCTV pintar di ruang publik, laporan warga melalui aplikasi daring, hingga jejak digital yang tersebar di media sosial. Dengan kecerdasan buatan dan analitik prediktif, aparat bisa mengidentifikasi potensi tindak kriminal sebelum benar-benar terjadi, serta mengalokasikan personel dengan lebih efisien. Polisi masa depan tidak lagi bekerja semata reaktif setelah pelanggaran berlangsung, tetapi menjadi institusi yang proaktif dalam mencegah risiko dan menjaga rasa aman.

Transformasi digital juga menjadi kunci memperkuat transparansi. Setiap interaksi polisi dengan warga dapat direkam melalui body camera yang terhubung langsung ke pusat data nasional. Sistem ini memberi perlindungan ganda: mencegah penyalahgunaan wewenang dari aparat sekaligus memberi jaminan keadilan bagi polisi yang bekerja sesuai aturan. Lebih jauh, laporan kinerja, penanganan kasus, hingga statistik kejahatan dapat ditampilkan melalui portal publik yang terbuka dan mudah

diakses. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek penegakan hukum, tetapi juga subjek yang aktif memantau, mengawasi, dan menilai kinerja kepolisian.

Contoh-contoh penerapan teknologi kepolisian dalam kehidupan sehari-hari bisa dibayangkan dengan jelas. Misalnya, sistem *smart traffic management* yang terhubung dengan kamera pintar dan sensor jalan raya. Pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi otomatis tanpa harus selalu ada polisi di lapangan, sementara denda bisa langsung terintegrasi dengan sistem pembayaran digital. Di kawasan pemukiman, aplikasi keamanan lingkungan memungkinkan warga melaporkan aktivitas mencurigakan secara cepat, lengkap dengan foto atau video, yang langsung masuk ke pusat data Polri untuk ditindaklanjuti. Bahkan, di ruang digital, patroli siber bisa dilakukan untuk mencegah penipuan daring, perdagangan narkoba melalui media sosial, hingga ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik sosial.

Selain itu, pengalaman negara lain dapat menjadi cermin dan inspirasi bagi Polri 2045. Di Amerika Serikat, sejumlah kota telah mengembangkan *predictive policing* dengan memanfaatkan algoritma untuk memetakan wilayah rawan kejahatan sehingga patroli bisa diarahkan lebih tepat sasaran. Singapura menerapkan konsep *smart policing* melalui jaringan kamera pintar yang terintegrasi dengan analitik data, memungkinkan polisi merespons insiden dalam hitungan menit. Sementara Korea Selatan mengembangkan unit *cyber patrol* untuk menanggulangi kejahatan daring, mulai

dari penipuan finansial hingga serangan siber lintas negara. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa teknologi bukan sekadar alat tambahan, melainkan pilar utama dalam strategi keamanan modern. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik tersebut, menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal, dan mengembangkannya dalam kerangka etika serta perlindungan hak-hak warga.

Namun, seperti setiap inovasi teknologi, digitalisasi kepolisian juga membawa tantangan yang serius. Isu privasi dan potensi penyalahgunaan data menjadi perhatian utama. Risiko ketergantungan pada algoritma juga menimbulkan dilema etis: bagaimana memastikan keputusan kepolisian tetap berlandaskan nilai keadilan, bukan sekadar output mesin? Di sinilah pentingnya membangun kerangka regulasi dan akuntabilitas yang kokoh. Polri tidak cukup hanya melek digital, tetapi harus mengembangkan *etika digital* yang menjamin keamanan masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Oleh karena itu, secanggih apa pun teknologi yang dimiliki, Polri 2045 tidak boleh terjebak pada logika mekanis semata. Polisi bukan hanya mesin penegak hukum berbasis data, tetapi juga aktor sosial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Digitalisasi harus berjalan beriringan dengan pendekatan humanis, agar kecanggihan teknologi tidak menciptakan jarak, melainkan justru memperkuat ikatan kepercayaan publik. Di sinilah pentingnya merancang Polri yang bukan hanya digital, tetapi juga dekat dengan rakyat, hadir di tengah kehidupan sehari-hari sebagai sahabat



dan mitra masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.

Digitalisasi bukan sekadar soal mengganti alat lama dengan yang lebih canggih. Ia adalah perubahan cara kerja, cara berpikir, bahkan cara berinteraksi dengan masyarakat. Polri 2045 yang digital bukan hanya institusi yang modern secara teknologi, melainkan juga berbudaya baru: terbuka, cerdas, dan peka terhadap kritik masyarakat yang kian kritis.

## **Polri Dekat dengan Rakyat: Community-Centered Policing**

Polri 2045 hanya akan menjadi institusi yang dipercaya apabila ia menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pengawasan, melainkan sebagai mitra sejajar dalam menjaga keamanan. Konsep *community-centered policing* menawarkan paradigma baru: polisi bukan hanya hadir ketika masalah muncul, tetapi terlibat aktif dalam kehidupan sosial sehari-hari, memahami dinamika lokal, serta bekerja sama dengan warga untuk mencegah potensi konflik dan kejahatan sejak dini.

Dalam praktiknya, polisi bisa lebih banyak berinteraksi melalui forum-forum warga, program edukasi di sekolah, hingga keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Polisi tidak lagi identik dengan wajah tegang di jalan raya atau di ruang pemeriksaan, melainkan sosok yang dapat ditemui di balai desa, masjid, gereja, pasar, bahkan dunia digital tempat

masyarakat muda berinteraksi. Dengan begitu, masyarakat merasakan bahwa polisi adalah bagian dari mereka sendiri, bukan entitas asing yang hanya muncul saat menindak pelanggaran.

Penguatan *Bhabinkamtibmas* atau Polisi RW dapat menjadi pondasi untuk membangun kedekatan ini. Mereka bisa berperan sebagai mediator dalam konflik keluarga, fasilitator dialog antarwarga, atau pendamping komunitas dalam mengembangkan program keamanan lingkungan. Kehadiran polisi dalam fungsi sosial seperti ini akan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat, sehingga keamanan bukan lagi tanggung jawab aparat semata, melainkan hasil kerja bersama.

Lebih jauh lagi, pendekatan berbasis komunitas ini selaras dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk dan kaya akan tradisi lokal. Polri masa depan dapat menggali kearifan lokal, mulai dari praktik musyawarah desa, sistem keamanan adat, hingga solidaritas sosial, lalu menjadikannya bagian integral dari strategi keamanan modern. Dengan demikian, *community-centered policing* tidak hanya menjadi jargon global, tetapi benar-benar terwujud dalam konteks Indonesia: sebuah model kepolisian yang mengakar di tanah air, membumi bersama masyarakat, dan berorientasi pada rasa aman yang inklusif bagi semua warga.

## Tantangan Menuju 2045

Membayangkan Polri 2045 sebagai institusi profesional, digital, dan dekat dengan rakyat tentu memberi harapan besar. Namun, jalan menuju ke sana penuh dengan tantangan struktural, budaya, maupun politik yang tidak ringan.

Pertama, **resistensi internal**. Budaya hierarki yang kaku, praktik korps yang menekankan loyalitas internal ketimbang pelayanan publik, serta sisa-sisa praktik koruptif bisa menjadi hambatan serius. Perubahan mindset membutuhkan waktu panjang, komitmen pimpinan, dan konsistensi dalam menegakkan reward–punishment tanpa pandang bulu.

Kedua, **skala dan kompleksitas Polri**. Dengan lebih dari 400.000 personel yang tersebar di seluruh nusantara, reformasi digital maupun budaya tidak mudah dijalankan secara merata. Indonesia memiliki tantangan geografis dan sosial yang unik—dari wilayah perkotaan super padat, hingga daerah terpencil yang sulit dijangkau teknologi. Menyatukan standar pelayanan yang konsisten di tengah keragaman kondisi menjadi pekerjaan besar.

Ketiga, **kompleksitas sosial dan politik**. Polri sering berada di bawah sorotan politik, baik dalam penanganan kasus besar maupun relasinya dengan penguasa. Tanpa perlindungan institusional dan budaya netralitas yang kuat, reformasi mudah tergelincir menjadi sekadar jargon yang tidak berjalan konsisten. Selain itu, keberagaman etnis, agama, dan

budaya masyarakat Indonesia menuntut Polri mampu membangun pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal.

Keempat, **ancaman baru di era digital**. Cybercrime lintas negara, penyalahgunaan data pribadi, hingga potensi kejahatan terkait krisis iklim akan semakin kompleks. Jika Polri tidak sigap mengembangkan keahlian dan infrastruktur digital, mereka bisa tertinggal dari para pelaku kejahatan yang justru lebih adaptif terhadap teknologi.

Kelima, **rapuhnya kepercayaan publik**. Kasus-kasus pelanggaran etik, kekerasan berlebihan, atau kedekatan dengan kekuasaan dapat menggerus legitimasi Polri dengan cepat. Dalam masyarakat yang semakin kritis dan terkoneksi lewat media sosial, satu kasus saja bisa merusak citra seluruh institusi. Kepercayaan publik membutuhkan pemeliharaan setiap hari, bukan hanya kampanye sesaat.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, Polri harus membangun strategi transformasi yang konsisten, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi publik. Tanpa itu, visi Polri 2045 hanya akan tinggal sebagai mimpi, bukan kenyataan.

## **Penutup: Polri Masa Depan sebagai Pilar Indonesia Emas**

Membayangkan Polri 2045 bukanlah sekadar wacana idealitis, tetapi sebuah **agenda strategis bangsa**. Indonesia Emas hanya mungkin terwujud

bila kepolisian bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar dipercaya, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Polri masa depan tidak lagi cukup hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi harus menjadi **penjaga peradaban demokrasi, penggerak harmoni sosial, dan pelindung hak-hak warga negara**. Profesionalisme ditunjukkan melalui tata kelola yang bersih, rekrutmen berbasis merit, serta integritas yang konsisten ditegakkan di setiap lini.

Di sisi lain, digitalisasi tidak boleh berhenti pada modernisasi teknologi, melainkan harus menyentuh cara kerja, transparansi, dan keterhubungan dengan masyarakat. Polri yang terhubung secara digital dengan publik akan lebih akuntabel, lebih cepat merespons masalah, dan lebih sulit menutup-nutupi penyimpangan.

Kedekatan dengan rakyat juga bukan jargon, tetapi diwujudkan dalam **kemitraan nyata dengan komunitas**. Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan model-model berbasis komunitas harus terus diperkuat agar polisi bukan sekadar hadir setelah masalah terjadi, melainkan menjadi sahabat masyarakat dalam mencegah kejahatan.

Jika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten, Polri 2045 akan menjadi **pilar penting Indonesia Emas**—institusi modern yang bukan hanya kuat secara organisasi, tetapi juga kokoh dalam kepercayaan rakyatnya. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, Indonesia akan benar-benar memiliki polisi

yang bukan sekadar aparat, melainkan **penjaga masa depan bangsa.**[]